



STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MELALUI SINERGI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER ISLAM

Nia Dwi Rahayu Putri

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Eka Wahyu Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Shofiya Zevania Putri

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Silvia Fatika Sari

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: niadwirp123@email.com, ekawahyu121106@gmail.com, shofiyazevaniaputri@gmail.com, silviafatikasari99@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

Abstract. *This article examines strategies for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through the synergy of Islamic fiscal and monetary policies grounded in principles of justice, sustainability, and economic stability. Using a descriptive qualitative method based on literature reviews of journals, books, and policy documents, the study analyzes the roles of zakat, infaq, waqf, Islamic sukuk, and sharia-based monetary operations in supporting sustainable development. The findings show that Islamic fiscal policies significantly contribute to reducing poverty, improving income distribution, and strengthening education and health sectors through more equitable wealth allocation. Meanwhile, Islamic monetary policies promote price stability, expand productive financing, and support environmentally friendly infrastructure development through green and social sukuk instruments. Digitalization, Islamic fintech, and transparent governance also enhance financial inclusion and improve the effectiveness of sharia-based economic policies. Overall, the study concludes that the synergy between Islamic fiscal and monetary policies provides an effective and practical strategy to accelerate SDG achievement because it offers an economic framework that is equitable, inclusive, stable, and oriented toward community empowerment and long-term sustainability.*

Keywords: *finance, sharia, policy, monetary, fiscal, economy, SDGs,*

Abstrak. Artikel ini mengkaji strategi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari jurnal, buku, dan dokumen kebijakan guna menganalisis peran instrumen zakat, infak, wakaf, sukuk syariah, serta operasi moneter

Received Oktober 28, 2025; Revised November 26, 2025; Desember 02 2025

* Nia Dwi Rahayu Putri, niadwirp123@email.com

syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, memperluas pemerataan pendapatan, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Sementara itu, kebijakan moneter Islam mendukung stabilitas harga, meningkatkan pembiayaan produktif, serta mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui instrumen sukuk hijau dan sosial. Digitalisasi, fintech syariah, dan tata kelola yang transparan turut berperan dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat efektivitas kebijakan berbasis syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter Islam merupakan strategi yang efektif dan aplikatif untuk mempercepat pencapaian SDGs karena mampu menawarkan kerangka ekonomi yang adil, inklusif, stabil, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan jangka panjang.

Kata kunci: keuangan, syariah, kebijakan, moneter, fiskal, ekonomi, SDGs,

LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi merupakan hal yang menjadi masalah besar bagi sebuah negara. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter berperan penting untuk menjaga kestabilan ekonomi, pertumbuhan, pemerataan, dan untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, kebijakan fiskal dan moneter secara konvensional masih sering mengalami ketidakberhasilan dalam praktiknya. Dalam Islam, kebijakan fiskal menjadi sarana untuk redistribusi kekayaan secara adil dengan menggunakan zakat dan wakaf sebagai instrumen utama. Sedangkan dalam moneter Islam memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan penguatan sektor riil serta penghindaran eksploitasi financial (Istiqomah dkk., 2025).

Dengan adanya kasus mengenai ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan perubahan iklim. PBB meluncurkan program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2015 yang mencakup 17 tujuan utama guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan. Adanya kebijakan fiskal dan moneter islam menjadi alternatif untuk mendukung dan mendorong tercapainya SDGs melalui prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi islam terlebih pada kebijakannya, dapat relevan dalam konteks SDGs dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

Pemenuhan program SDGs ini dibutuhkan strategi yang tepat agar ketimpangan ekonomi maupun kemiskinan semakin merajalela. Dengan strategi dan perencanaan yang

matang serta menerapkan kebijakan fiskal dan moneter Islam dapat menjadi jalan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Transformasi digital merupakan salah satu strategi yang dapat diambil mengingat perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, pengelolaan dana zakat dan wakaf dengan transparan juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai SDGs (Aldi & Khairanis, 2025).

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bahwa ekonomi islam dengan kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu untuk menodorngr tercapainya SDGs. Dengan berbekal literatur dari jurnal, artikel dan buku, dapat membantu memahami bahwa ekonomi islam bisa menjadi alternatif jika dengan ekonomi konvensional masih mengalami kelemahan.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Muana Nanga, kebijakan moneter bertujuan memengaruhi kebijakan agregat dan meminimalkan ketidakstabilan (Astuty dkk., 2023), berbeda halnya dengan kebijakan moneter islam yang wajib bebas dari riba (bunga) dan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) guna mengatur peredaran uang sesuai prinsip syariah (Irawan dkk., 2025). Sementara itu, kebijakan fiskal melalui pajak dan APBN yang dirancang pemerintah bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, memperbaiki keadaan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga pasar (Ibrahim dkk., 2021). Kedua kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama ekonomi islam yaitu kesejahteraan umat (*falah*) dan keadilan sosial yang selaras dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Yudanto dkk., 2022).

Kajian moneter islam oleh Amirullah & Yazid (2025) menekankan penggantian riba dengan instrumen bagi hasil seperti saham komersial dan sertifikat musyarakah, yang berfokus pada aset riil untuk mencapai stabilitas dan keadilan ekonomi (Amirullah & Yazid, 2025). Sementara itu, penelitian Azis (2019) menyoroti potensi kebijakan fiskal islam melalui optimalisasi instrumen zakat, infak, dan wakaf produktif dalam pencapaian SDG 1 (pengentasan kemiskinan) dan SDG 10 (mengurangi ketimpangan) (Aini, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Abdullah dan Muhamad (2023), yang menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau syariah melalui konsep pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan konsumsi etis (halal dan *thayyib*) secara langsung

mendukung SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim) (Latifah & Abdullah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Data penelitian diperoleh dari studi literatur yang mencakup jurnal, buku, dan dokumen kebijakan terkait keuangan syariah, serta wawancara semi-terstruktur dengan para ahli ekonomi Islam dan praktisi pengelolaan zakat, wakaf, serta lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi dan tematik, yang bertujuan mengidentifikasi dan mengorganisasi tema utama seperti peran instrumen fiskal Islam dalam redistribusi kekayaan, kebijakan moneter bebas riba, penggunaan sukuk dalam pembiayaan berkelanjutan, dan pengaruh digitalisasi pada inklusi keuangan syariah. Penelitian ini difokuskan pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah di Indonesia dengan tujuan menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan fiskal dan moneter Islam yang efektif, serta memperkuat pemahaman kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan aplikatif untuk mendukung pencapaian SDGs melalui sinergi kebijakan ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mendukung SDGs

Studi empiris menunjukkan keuangan islam berhubungan positif dalam mendukung pencapaian SDGs. Di Indonesia, lembaga Baitul Mal wat Tamwil (BMT) berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kapasitas pengusaha (Kholil dkk., 2025). Sistem moneter telah melalui perubahan dari waktu ke waktu dan dalam bidang keuangan ini banyak diteliti baik secara empiris maupun historis jika dibandingkan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya (Muhammad, 2020).

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang baik dari sisi internal

maupun eksternal agar pertumbuhan ekonomi yang merata dapat tercapai. Dalam hal menjaga kestabilan nilai uang, M. Umar Chapra menegaskan bahwa kerangka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berfokus pada pengelolaan stok uang dengan tujuan maksimal memanfaatkan kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa demi kesejahteraan sosial secara umum (Muhammad, 2020).

Agar kebijakan moneter dapat berjalan efektif, diperlukan koordinasi dengan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Chapra, 2021). Kebijakan fiskal sendiri merupakan bagian penting dari publik yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan utang pemerintah. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian ditentukan oleh sejauh mana pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang dipengaruhi oleh tujuan sosio-ekonomi, orientasi ideologi, serta karakteristik sistem ekonomi yang berlaku (Muhammad, 2020).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan yang akhir-akhir muncul adalah (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Bahkan walaupun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan menanggulangi kaum muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama dan dakwah menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Stabilitas dalam nilai uang, dalam kerangka Islam adalah ditujukan dengan sasaran memungkinkan *Medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan penghitungan patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil. Stabilitas nilai uang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dalam kerangka referensi yang Islami karena hal ini ditekankan secara tegas oleh Islam, khususnya berkaitan dengan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia (Muhammad, 2020).

Kebijakan fiskal dan moneter Islam memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian SDGs. Melalui lembaga keuangan Islam seperti BMT, masyarakat kecil dapat memperoleh akses pembiayaan yang mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi (SDG 1 dan SDG 8). Kebijakan moneter Islam berfokus pada stabilitas nilai uang, keadilan, dan penghindaran riba untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan beretika (SDG 8 dan SDG 16). Sementara itu, kebijakan fiskal Islam menekankan pemerataan melalui zakat, infak, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan dan

meningkatkan kesejahteraan sosial (SDG 1, SDG 10, dan SDG 4). Sinergi antara keduanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam (Miskiyah dkk., 2022).

Peran Sinergi antara Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter islam memegang peranan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam salah satu kebijakan yang menjadi perhatian penting dalam perekonomian. Imam al-Ghazali menjadikan kebijakan fiskal sebagai salah satu kebijakan terkait upaya dalam meningkatkan kesejahteraan yang berlandaskan keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Miskiyah dkk., 2022). Dalam perspektif syariah, kebijakan moneter harus terbebas dari riba dan bunga, mengingat riba yang terdapat pada bunga bank sangat dilarang dalam Islam. Larangan tersebut menyebabkan bunga tidak lagi berperan dalam sistem ekonomi kapitalis, di mana bunga biasanya menjadi alat utama dalam pengelolaan uang. Sebaliknya, Islam menerapkan prinsip bagi hasil sebagai dasar pengelolaan keuangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar dilakukan dengan cara menyesuaikan jumlahnya sesuai kebutuhan (Irawan dkk., 2025).

Kebijakan fiskal dan moneter mempunyai peranan krusial dalam menjaga stabilitas kesenjangan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui alokasi dan distribusi sumber daya secara merata kepada masyarakat. Pemerataan distribusi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mencapai kestabilan makroekonomi di Indonesia. Sementara itu, kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah lenih bertujuan mengendalikan stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal berbasis syariah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi (Hafizhah dkk., 2024).

Kebijakan moneter berbasis Islam sudah diterapkan di Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi, di antaranya melalui penerbitan surat berharga Bank Indonesia syariah (SBIS), pembiayaan kepada bank syariah, serta penerbitan surat berharga syariah negara. Kebijakan ini mampu menangani masalah ekonomi seperti inflasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berdampak pada pengurangan kesenjangan dalam jangka waktu pendek. Sementara itu, kebijakan

fiskal Islam mulai dilaksanakan di Indonesia melalui penyaluran zakat kepada masyarakat. Pembiayaan dari zakat ini membantu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi, seperti pengangguran dan kesenjangan sosial. Selain itu, zakat turut memberikan kontribusi pada stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang sehat pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesenjangan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penstabilan ekonomi yang diterapkan adalah operasi moneter berbasis syariah. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap likuiditas pada bank-bank syariah, yang selanjutnya berdampak pada Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Kondisi likuiditas ini memengaruhi kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan, termasuk untuk sektor riil, sehingga dapat terwujud keseimbangan ekonomi. Selain kebijakan moneter Islam, pemerintah juga menjalankan kebijakan fiskal Islam sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan fiskal Islam saat ini adalah pendistribusian kekayaan melalui dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan utama meratakan pendapatan guna mengurangi kesenjangan di Indonesia (Hafizhah dkk., 2024).

Strategi Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam untuk Mencapai Tujuan Pembangunan SDGs

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan aspirasi setiap negara untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memiliki peranan penting dalam mendukung strategi pembangunan serta memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial. Penerapan prinsip-prinsip Islam secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter Islam.

Dalam kebijakan fiskal Islam, instrumen seperti zakat dan wakaf digunakan untuk membantu mencapai tujuan SDGs. Menurut Hamdiah dan Sugianto (2024) menyebutkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapat mustahiq sebesar 30,5% (Istiqomah dkk., 2025). Menurut Wahyuningsih dengan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi bagi rumah tangga miskin. Wakaf memiliki peran penting dalam menyediakan dana bagi sektor sosial, misalnya wakaf tunai yang digunakan untuk mendanai universitas dan rumah sakit yang

mana dalam hal ini mendukung pencapaian SDG 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan berkualitas) (Aldi & Khairanis, 2025).

Sedangkan dalam kebijakan moneter tidak lepas dari pembahasan uang. Strategi yang dapat dilakukan dalam kebijakan ini baik di Indonesia maupun di negara lain dengan sukuk hijau dan sosial, operasi pasar terbuka, suku bunga acuan dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Sukuk (hijau dan sosial) sebagai instrumen obligasi syariah telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung SDGs, misalnya pembangunan rumah sakit, sekolah dan infrastruktur hijau. Hal ini memanfaatkan sukuk untuk keberlangsungan lingkungan yang sesuai dengan SDG 7 (Energi bersih dan terjangkau) dan SDG 13 (Aksi iklim) (Aldi & Khairanis, 2025).

Dalam operasi pasar terbuka, bank negara dapat melakukan pembelian maupun penjualan surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder agar memengaruhi likuiditas pasar serta mengontrol peredaran uang. Jika dengan suku bunga acuan, bank negara akan menetapkan suku bunga tertentu agar pinjaman lebih murah (Alvin dkk., 2024). Strategi selanjutnya yaitu dengan program sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA) yang dapat digunakan antar bank untuk menempatkan dana kelebihan likuiditas dengan sistem bagi hasil. Dari beberapa strategi diatas jika dilakukan dengan penanganan dan pengelolaan yang tepat SDGs akan tercapai dengan pasti (Raudah dkk., 2025).

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan adanya digitalisasi ini dapat memperluas inklusi keuangan dan memperkuat kontribusi sosial-ekonomi melalui instrumen zakat, fintech syariah, wakaf, dan sukuk berkelanjutan. Fintech syariah berperan penting dalam pembiayaan syariah digital dengan perusahaan seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Ammana dengan menyediakan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang awalnya sulit memperoleh pendanaan lewat konvensional. Pembiayaan yang diberikan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah dan mudharabah sehingga terhindar dari riba dan praktik spekulatif. Perkembangan ini mendukung target SDG 8 (Peningkatan inklusi keuangan) dan SDG 9 (Pembangunan industri inovatif). Ditambah dengan adanya edukasi berkelanjutan, penguatan regulasi dan kolaborasi multisektor agar digitalisasi ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap SDGs (Suyatno dkk., 2025).

Kebijakan fiskal islam melalui instrumen zakat dan wakaf membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, kebijakan moneter islam melalui instrumen hijau, sosial, operasi pasar terbuka, suku bunga acuan syariah dan SIMA dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pembiayaan proyek berkelanjutan. Bersama regulasi dan sinergi multisektor, kedua kebijakan ini mendorong pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal dan moneter islam berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen kebijakan fiskal mampu untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam moneter islam, yang berprinsip tanpa riba dan penguatan sektor riil mampu mengatur stabilitas harga, inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara sehat.

Sementara sinergi antara kedua kebijakan tersebut membuat fondasi ekonomi semakin kuat. mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan sektor produktif, dan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat bawah melalui lembaga keuangan syariah seperti BMT. Kebijakan fiskal dan moneter islam tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan distribusi kekayaan dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, ekonomi islam menawarkan solusi dengan menekankan keadilan sosial dan berkelanjutan sehingga selaras dengan tujuan SDGs. Penggunaan teknologi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sosial, serta memperkuat regulasi dan kelembagaan syariah merupakan beberapa alternatif dari kebijakan fiskal dan moneter islam untuk menghadapi tantangan ekonomi. Oleh sebab itu, pengintegrasian prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi pembangunan nasional merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian SDGs.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter Islam melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah serta pemanfaatan inovasi digital seperti *fintech* dan sukuk berkelanjutan. Pengelolaan zakat, infak, dan wakaf harus ditingkatkan agar lebih efektif menekan ketimpangan dan mendukung kesejahteraan. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan syariah dapat lebih optimal dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Aldi, M., & Khairanis, R. (2025). Ekonomi Islam dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1b), 2408–2416. <https://doi.org/doi.org/10.62710/malxmn07>
- Alvin, N., Ayuningtyas, R. M., & Khadafi, Y. B. (2024). Analisa Tentang Kebijakan Moneter Islam dan Pendapatan Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(2), 153–161. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.164>
- Amirullah, S. H. A., & Yazid, M. (2024). Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 243–255. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.394>
- Astuty, S., Basmar, E., & Hasan, M. (2023). *Ekonomi Moneter*. TAHTA MEDIA GROUP.
- Chapra, M. U. (2021). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani.
- Hafizhah, N. Z., Hikmah, L., & Rusgianto, S. (2024). *Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Islam Terhadap Kesenjangan di Indonesia*. 7.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Kholis, N. A. N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Irawan, H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2025). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(15), 263–277. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.23409>
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18–33. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2863>
- Kholil, A., Zuardi, M., Amrin, & Juryatina. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191–210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). Perspektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau dan Biru dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–22. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>

- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Muhammad. (2020). *Makroekonomi Islam Suatu Pengantar*. UPP STIM YKPN.
- Raudah, E., Faizin, M., Akbar, M. R., Haqqi, M., & Setyanoor, E. (2025). Moneter Syariah dan Ekonomi Hijau: Integrasi untuk Keberlanjutan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 141–151.
- Suyatno, M. I. Y., Praptitorini, M. D., Astohar, A., & Savitri, D. A. M. (2025). Strategi Penerapan Ekonomi Islam Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(5), 27–33. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i5.6173>
- Yudanto, D. S., Handayani, W. T., Puro, I. J., Widiyaningrum, M., & Hestinasari, V. W. (2022). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Economics Business Finance and Entrepreneurship*, 1(03), 32–36.